

CASCADING KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

MISI DAERAH

SASARAN

TUJUAN

STRATEGIS

TAKTIKAL

OPERASIONAL

VISI
PESIRIS SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

MISI 1
Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas

Sasaran 1.1.2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing
- Nilai SAKIP - Nilai SPBE

Sasaran 1.1.3. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Birokrasi
- Nilai Pelayanan Publik
- Rasio Inovasi Daerah - Indeks Merit

Tujuan Kecamatan
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas dan bersinergi
Persentase capaian kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan
Nilai AKIP Kecamatan Koto Xi Tarusan

Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Kematangan Inovasi

Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Kualitas pembinaan serta pengawasan Pemerintahan nagari
1. Persentase nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik. 2. Angka Kemiskinan ekstrim. 3. Prevalensi stunting (EPPGBM)

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan
Persentase Konflik yang diselesaikan

Meningkatnya tata kelola Organisasi
Indikator : 1. Peningkatan Nilai AKIP. 2. Capaian Kinerja Program

Meningkatnya kualitas Pelayanan publik
1.persentase pelayanan publik yang dilakukan, 2 jumlah inovasi yang didaftarkan di IGA

Meningkatnya kualitas penataan nagari
Persentase fasilitasi penataan nagari

Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan
Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Meningkatnya penyelesaian permasalahan trantibum yang di fasilitasi
Persentase permasalahan trantibum yang di fasilitasi

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
- Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan dan evaluasi

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum
- Persentase Ketersediaan Kelengkapan Administrasi Umum

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan
- Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
-1. Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan, 2. Jumlah inovasi

Meningkatnya fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan nagari
-Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan Administrasi baik

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan di Nagari
- Jumlah Usulan Program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas
- Jumlah fasilitasi lembaga sosial yang dibina

Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibun
- Jumlah penanganan permasalahan Trantibun

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
II. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang terkait dengan pelayanan non usaha
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan non perizinan
3. sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dari Pendayagunaan Aset Desa

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
I. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
II. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

E. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
F. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
1. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di kecamatan

4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
II. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
III. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya